

Menjaga Akuntabilitas Hibah
Pembiayaan Infrastruktur

Hal 4

Pemeriksaan Covid-19
dari Hulu ke Hilir

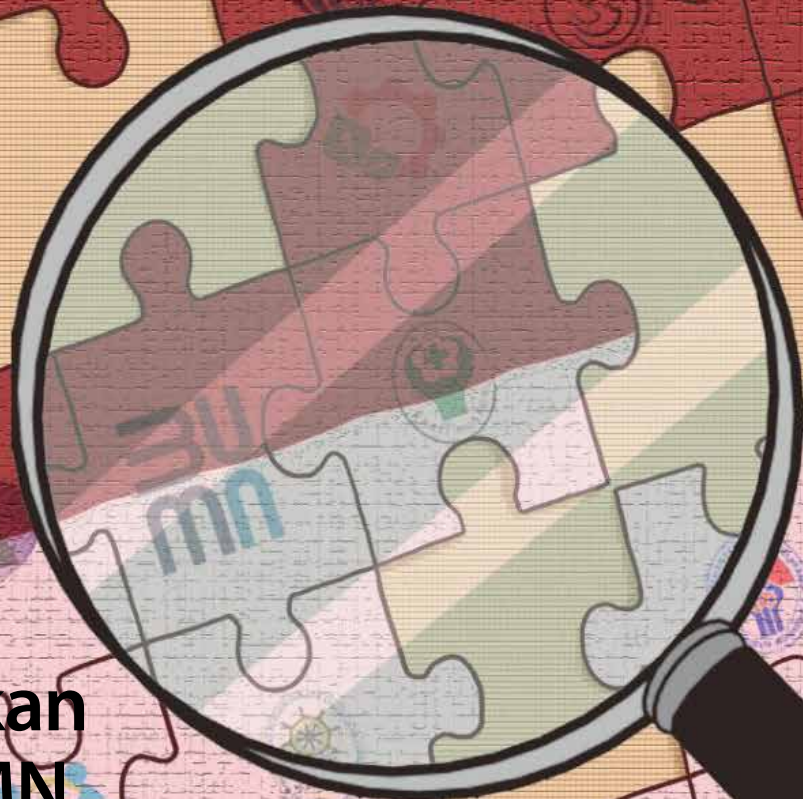
Hal 16

BPK-IMO Bahas
Rencana Pemeriksaan

Hal 25



Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19



Hasil Perbaikan
Revaluasi BMN
tidak Akurat

Mencegah Risiko Tata Kelola Penanganan Covid-19



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna

Kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bergerak lebih awal melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Langkah ini dilakukan karena desain dan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam webinar “Persiapan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19” di Jakarta, Selasa (22/9). Topik yang dibahas pada webinar tersebut adalah “Kebijakan Pemerintah Daerah, Ru-

mah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”.

Di awal diskusi, Agung menyatakan BPK telah memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang di dalamnya mencakup pemeriksaan atas program pemulihan ekonomi nasional. *Kickoff* dan *entry meeting* telah dilaksanakan pada 8 dan 14 September 2020. Saat ini, seluruh tim pemeriksa dari berbagai Auditorat Keuangan Negara terus melaksanakan pengumpulan data dan informasi. “Pengumpulan data dan informasinya sejatinya telah kami mulai sejak tiga bulan lalu,” ucap dia.

Agung mengatakan, sedari awal ia menyatakan implementasi kebijakan dalam kondisi kedaruratan berpotensi menimbulkan risiko terhadap tata kelola. Risiko itu salah satu satunya mengenai lemahnya koordinasi dalam menghadapi pandemi Covid-19, baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi berpotensi menimbulkan risiko strategis pencapaian tujuan program penanganan Covid-19 dan risiko operasional implementasi program di lapangan.

"Kurang memadai atau kurang tepatnya desain dan implementasi pengendalian internal masa darurat yang menimbulkan risiko ketidakpatuhan bahkan kecurangan atau *fraud*, inefisiensi dalam penggunaan sumber daya publik termasuk dana bantuan, tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang antara lain tecermin dari tidak tercapainya tujuan *government expenditure* yang di dalamnya termasuk tidak tepatnya penyaluran bantuan sosial," ucap dia.

Risiko terakhir adalah risiko pemeriksaan, yaitu ketika hasil pemeriksaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya akibat lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan akses terhadap sumber data dalam kondisi darurat seperti saat ini.

Pemeriksaan BPK kali ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai risiko tersebut dan mengembangkan pendekatan pemeriksaan yang meliputi aspek keuangan, kinerja dan kepatuhan atas seluruh lingkup keuangan negara. "Oleh karena itu kami istilahkan pemeriksaan penanganan Covid-19 sebagai *Risk Based Comprehensive Audit*," ucap dia.

Ia menambahkan, kebutuhan dalam implementasi kebijakan yang bersifat masif dan melibatkan pemerintah pusat dan seluruh jajaran pemerintah daerah, menempatkan peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam kebijakan implementasi maupun pengawasannya. Sehubungan dengan penanganan Covid-19, Kementerian Dalam Negeri diketahui telah menyusun sejumlah regulasi bagi daerah, termasuk *refocusing* dan relokasi anggaran, percepatan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dan pembentukan gugus tugas di daerah.

Sejumlah kebijakan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah responsif dan proaktif dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono



■ Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Bahrullah Akbar

Ia mengatakan, pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, memiliki peran penting yang sangat menentukan keberhasilan berbagai program pemerintah, khususnya dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Agung menambahkan, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan model komunikasi dan koordinasi yang efektif yang dapat mendukung pelaksanaan tugas besar ini. Dengan komunikasi dan koordinasi yang efektif, kata dia, akan tercipta suasana kerja yang kondusif. Model komunikasi dan koordinasi inilah yang akan membangun kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dan antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait tema diskusi, ia mengatakan melonjaknya pasien Covid-19 diikuti pula dengan semakin padatnya fasilitas isolasi dan instalasi gawat darurat di berbagai rumah sakit (RS). RS rujukan membutuhkan penambahan perangkat medis seperti ventilator, obat-obatan, hingga tenaga medis.



■ Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan



■ Dirjen Adwil Kemendagri, Safrizal ZA

“Saat ini, sejujurnya kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, desain kebijakan yang tepat dan implementasi yang responsif serta proaktif adalah hal yang sangat ditunggu,” ucap dia.

Agung menegaskan, kehadiran BPK untuk melakukan pemeriksaan di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan Covid-19 bukan hanya bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas. BPK ingin responsif dan membantu mengidentifikasi masalah yang berkembang sehingga dapat segera diatasi dengan kebijakan yang solutif. Pemeriksaan ini juga menjadi instrumen yang penting dan strategis untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam kondisi kedaruratan sebagaimana pengalaman empiris sebelumnya.

Dalam webinar yang sama, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar mengatakan, pandemi berdampak pada

perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja serta pembiayaan. Atas dasar itu, pemerintah menetapkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi undang-undang.

BPK, ungkap Bahrullah, juga telah bergerak cepat dengan lebih dulu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang di dalamnya termasuk pemeriksaan atas program pemulihan ekonomi nasional.

BPK berharap ada keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 dengan mempertimbangkan kemampuan, keuangan, sumber daya manusia, dan strategi penanganan yang tepat. Selain itu, keselarasan dalam penanganan kesehatan, persiapan jaring pengaman sosial, dan dampak ekonomi.

Bahrullah menyatakan, BPK hadir dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam situasi darurat Covid-19. BPK pun sudah merumuskan beberapa kebijakan terkait pemeriksaan dalam masa pandemi Covid-19.

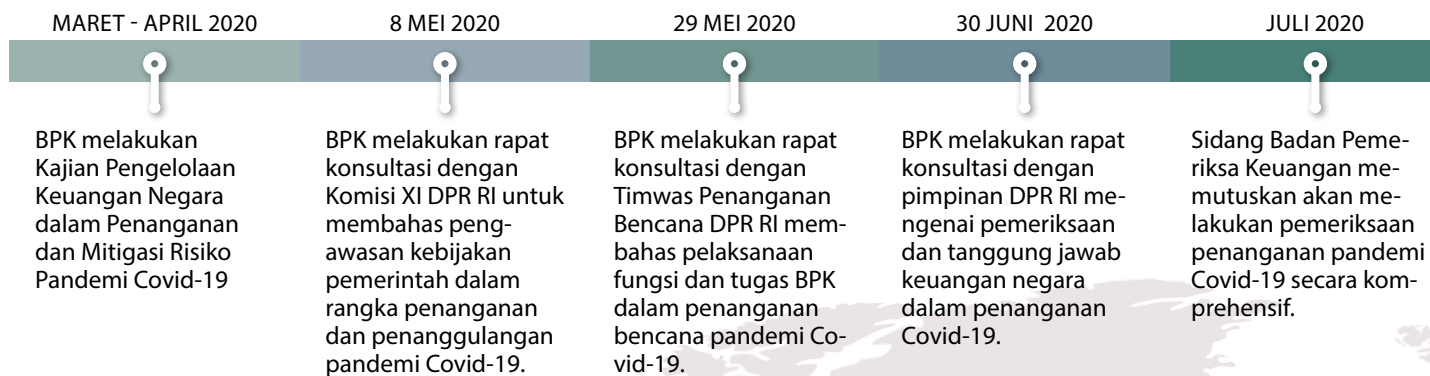
Kebijakan pertama adalah pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive audit*). *Comprehensive audit* dilakukan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Cakupan pemeriksaan antara lain meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, tambahan belanja negara/daerah, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BPK juga melakukan observasi secara terstruktur atas perkembangan kebijakan, regulasi, dan implementasinya.

Berikutnya adalah kajian komprehensif dengan fokus pada identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemeriksaan tersendiri dibagi dua, yaitu kepatuhan dan kinerja. “Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah menilai apakah realokasi dan *refocusing*, penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang sosial, dan penanganan dampak ekonomi terkait pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara kinerja bertujuan untuk melihat efektivitas upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.” ●

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Gerak BPK



Tujuan Pemeriksaan

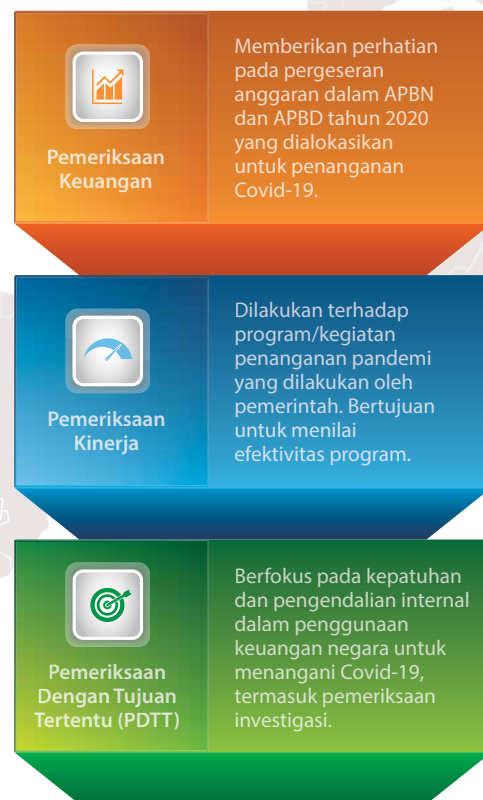
- Untuk menilai efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

7 Pertanyaan Pemeriksaan

- 1 Berapa dan bagaimana alokasi anggaran disediakan? Untuk apa saja?
- 2 Berapa dan bagaimana anggaran direalisasikan? Apakah sesuai peruntukannya? Tepat salur?
- 3 Apakah manfaat/fasilitas/bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak menerima? Apakah tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga?
- 4 Apakah seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai asersi?
- 5 Apakah terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran dalam kondisi darurat pandemi Covid-19?
- 6 Apakah pengadaan barang dan jasa telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa pandemi Covid-19?
- 7 Apakah manajemen penanggulangan bencana pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan memadai?

Pendekatan Pemeriksaan: *Risk-based Comprehensive Audit*

Pemeriksaan menyeluruh berbasis risiko dengan gabungan tujuan ketiga jenis pemeriksaan.



TINGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DAN PANDEMI COVID-19

28 JULI 2020

8 SEPTEMBER 2020

14 SEPTEMBER 2020

22 SEPTEMBER 2020

24 SEPTEMBER 2020

AKN VI BPK menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) persiapan pemeriksaan anggaran pandemi Covid-19.

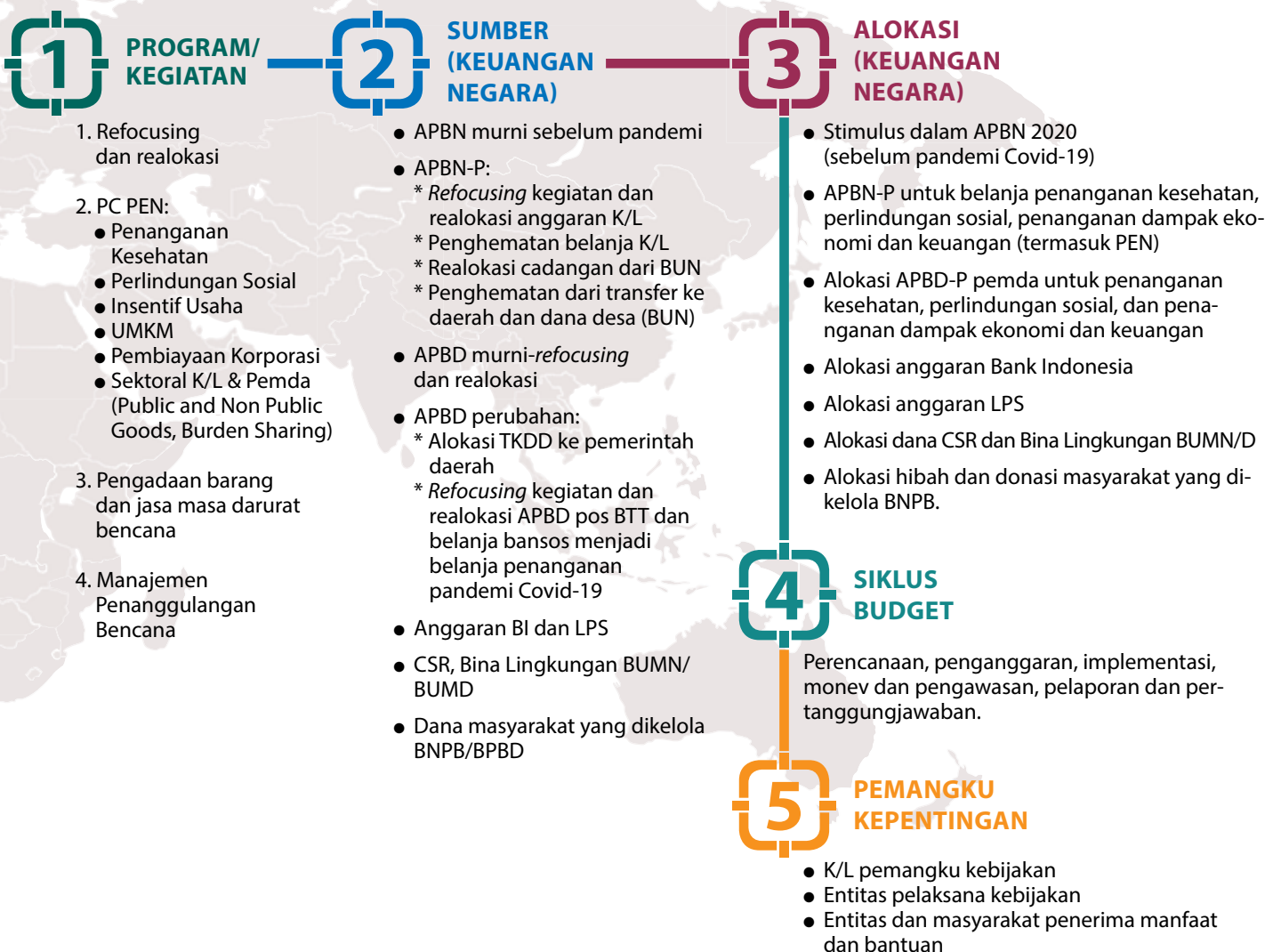
BPK dan Pemerintah gelar *kick-off meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 di Istana Negara.

BPK menggelar *entry meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 secara virtual.

Badiklat BPK menyelenggarakan webinar persiapan pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 dengan topik "Kebijakan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia".

Rakor Pokja Pemeriksaan Tematik AKN V. Salah satu pemeriksaan tematik yaitu pemeriksaan atas penanganan dampak pandemi Covid-19.

Lingkup Pemeriksaan



Sumber: Ditama Revbang dan Tim DSR